

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Adi Autopo, Arisento dan Arif Adrianys, 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Adjie, Habib, 1999, *Pemahaman Terhadap Bentuk SKMHT*, Mandar Maju, Bandung.
- Adjie, Habib, 2011, *Hukum PPAT Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan PPAT*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta.
- Badrulzaman, Mariam Darus, 1987, *Bab-bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fidusia*, Cetakan IV, Alumni, Bandung.
- Bartens, K, 1997, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2006, *KUHPerdata Buku III*, Alumni, Bandung.
- ELIPS, 1998, *Hukum Jaminan Indonesia*, Cetakan Pertama, Jakarta.
- E, Sumaryono, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2001, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Hadi, M. Luthfan Darus, 2017, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan PPAT*, UII Press, Yogyakarta.
- Hadisoepipto, Hartono, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta.
- Hasan Djuhaendah, 2004, *Kajian Peraturan Pertanahan*, PT Harfarindo, Jakarta.
- Hariri, Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Harsono, Boedi, 2005, *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanannya)*, Djambatan, Jakarta.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Indonesia*, Cetakan Pertama, Prenada Media, Jakarta.
- HS., Halim, 2017, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- HS., Salim, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes, 2004, *Cross Default & Cross Collateral Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah*, PT Refika Aditama, Bandung.
- \_\_\_\_\_. 2004, *Mengupas Tuntas kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Kamelo, H.Tan, 2006, *Hukum Jaminan Fidusia*, Cetakan Kedua, Edisi Pertama, Alumni, Bandung.

- Mertokusumo, Sudikno, 1995, *Syarat-Syarat Baku dalam Hukum Kontrak (Penataran Hukum Perdata)*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Muljadi, Kartini, dan Widjaja, Gunan, 2005, *Hak Tanggungan*, Kencana, Jakarta.
- Muljono, Teguh Pudjo, 1990, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, Cetakan Kedua Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta.
- Mustofa, 2010, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.
- Notodisoerjo, R. Soegondo, 1982, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim, H. S., 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Buku Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUHPerdata*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2016, *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Satrio, J. 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- \_\_\_\_\_ 2004, *Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Hak Tanggungan 2*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Setiawan, Rachmat, 1991, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Cet-1, Binacipta, Bandung.
- Setiono, 2005, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana UNS, Surakarta.
- Situmorang, Victor. M., *et.al*, 1992, *Grosse Akta Dalam Pembuktian Dan Eksekusi*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Reny, 1999, *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok Dan Masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 2009, *Hukum Acara Perdata Indonsia*, Liberty, Yogyakarta.
- Soeroso, R., 1999, *Perbandingan Hukum Perdata*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Internasa, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sulihandari, Hartanti, dan Rifani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi PPAT*, Dunia Cerdas, Jakarta.
- Suryono, Leli Joko, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, LP3M UMY, Yogyakarta.
- Sutarno, 2003, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Bandung.

Tje'Aman, Edy Putra, 1999, *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*, Citra

Aditya Bakti, Bandung.

Tobing, G.H.S Lumbun, 1983, *Peraturan Jabatan PPAT*, Erlangga, Jakarta.

Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1992, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*,

Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta

## **B. Tesis**

Anggraini Simangunsong, Defina, 2018, Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris

Terkait Dengan Tempat Kedudukan Dan Wilayah Jabatan Notaris Di

Kabupaten Simalungun, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program

Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.

Charolin, Margareta, 2013, Pengawasan Terhadap Pelanggaran PPAT Yang

Menjalankan Kewenangannya Di Luar Wilayah Jabatan Oleh Majelis

Pengawas Daerah di Kota Pekanbaru, *Tesis*, Magister Kenotariatan,

Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,

Yogyakarta.

Fiantoro, Adhtya, 2019, Peran MPD Dalam Mencegah Terjadinya

Penandatanganan Akta Di Luar Tempat Kedudukan PPAT Di

Kabupaten Sleman, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program

Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Nuzul Indrawan, Lalu, 2018, Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat di Luar Wilayah Jabatan Notaris, *Tesis*, Magister Kenotariatan, Program Pascasarjana, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Mataram.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Staatsblad* Nomor 1847-23)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Jabatan PPAT (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5491)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Peraturan Jabatan PPAT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat  
Pembuat Akta Tanah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998  
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  
3746)

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak  
Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah (Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Thun 1996 Nomor 3643)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP  
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta  
Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1  
Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah  
Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akat  
Tanah yang telah diubah menjadi Peraturan Kepala Badan Pertanahan  
Nasional Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan  
Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang  
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998  
tentang Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun... Nomor...).

Kode Etik Pejabat Pembuat Tanah.

#### **D. Putusan**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 297 K/PDT/2017

## **E. Wawancara**

Sabdo, Hari, 2022, Faktor Pendorong PPAT Membuat Surat Kuasa  
Membebankan Hak Tanggungan Di luar Wilayah Jabatannya,  
*Wawancara*, Yogyakarta, 21 Maret.

Minarso, Edi, 2022, Sanki yang Dapat Dijatuhi Pada Kasus PPAT terhadap  
Akta yang Dibuat Di luar Wilayah Jabatannya, *Wawancara*,  
Yogyakarta, 1 Juni.